

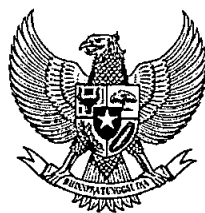


**PERATURAN WALI KOTA
KOTA PEKANBARU**

NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.993.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp991.723.521.011,00;
- b. Pendapatan transfer Rp2.001.927.231.061,00,00; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp991.723.521.011,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah Rp845.256.101.625,00;
 - b. Retribusi daerah Rp49.564.561.600,00;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp90.682.758.829,00;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.256.101.625,00 (Delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.564.561.600,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.682.758.829,00 (Sembilan puluh milyar

enam ratus delapa puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp845.256.101.625,00 (Delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta serratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp46.455.415.967,00;
 - b. Pajak Restoran Rp140.469.256.583,00;
 - c. Pajak Hiburan Rp18.110.666.817,00;
 - d. Pajak Reklame Rp32.815.918.102,00;
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp168.381.744.973,00;
 - f. Pajak Parkir Rp18.852.037.685,00;
 - g. Pajak Air Tanah Rp13.933.548.773,00;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp119.439.975,00;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp10.478.171,00;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp199.194.350.380,00;
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Rp206.913.244.199,00;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.455.415.967,00 (Empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.469.256.583,00 (Seratus empat puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.110.666.817,00 (Delapan belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.815.918.102,00 (Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp168.381.744.973,00 (Seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.852.037.685,00 (Delapan belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.933.548.773,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp119.439.975,00 (Seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.478.171,00 (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp199.194.350.380,00

(Seratus sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (12) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp206.913.244.199,00 (Dua ratus enam milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp49.564.561.600,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Retribusi Jasa umum Rp30.475.643.800,00;
 - Retribusi Jasa Usaha Rp2.286.917.800,00;
 - Retribusi Perizinan Tertentu Rp16.802.000.000,00;
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.475.643.800,00 (Tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.286.917.800,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.802.000.000,00 (Enam belas milyar delapan ratus dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Rp6.220.098.957,00;
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp90.682.758.829,00 (Sembilan puluh milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rp1.277.675.000,00;
 - Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rp7.067.491.305,00;
 - Jasa Giro Rp2.000.000.000,00;
 - Pendapatan Bunga Rp500.000.000,00
 - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp150.000.000,00
 - Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp15.000.000.000,00;
 - Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp529.327.980,00;
 - Pendapatan BLUD Rp64.158.264.544,00;

- (4) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.277.675.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp7.067.491.305,00 (Tujuh milyar enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).
- (6) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (7) Pendapatan Bunga Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp529.327.980,00 (Lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp64.158.264.544,00 (Enam puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.983.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi Rp2.493.712.509.089,00;
- b. Belanja modal Rp469.938.242.983,00;
- c. Belanja tidak terduga Rp20.000.000.000,00; dan
- d. Belanja transfer Rp0,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.493.712.509.089,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas satu juta lima ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai Rp915.096.344.635,00;
 - b. Belanja barang dan jasa Rp1.472.205.918.613,00;
 - c. Belanja bunga Rp0,00;
 - d. Belanja subsidi Rp2.199.925.000,00;
 - e. Belanja hibah Rp103.131.920.841,00; dan
 - f. Belanja bantuan sosial Rp1.078.400.000,00.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.096.344.635,00 (Sembilan ratus lima belas milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.205.918.613,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.199.925.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.131.920.841,00 (Seratus tiga milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.078.400.000,00 (Satu milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.096.344.635,00 (Sembilan ratus lima belas milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN Rp454.296.515.756,00;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp234.547.729.620,00;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp190.695.134.130,00;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD Rp30.448.089.668,00;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp1.121.452.161,00;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.326.960.000,00;
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp2.660.463.300,00;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp454.296.515.756,00 (Empat ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.547.729.620,00 (Dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp190.695.134.130,00 (Seratus sembilan puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.448.089.668,00 (Tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.121.452.161,00 (Satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.326.960.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD Rp2.660.463.300,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp454.296.515.756,00 (Empat ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN Rp329.474.920.732,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp32.355.805.454,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp9.771.294.442,00;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp24.237.883.264,00;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp6.452.257.742,00;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp19.976.990.194,00;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.118.675.812,00;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp199.561.908,00;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp24.473.835.660,00;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp808.822.644,00;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.426.467.904,00;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.474.920.732,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.355.805.454,00 (Tiga puluh dua satu milyar tiga tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.771.294.442,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.237.883.264,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.452.257.742,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.976.990.194,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.118.675.812,00 (Tiga milyar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp199.561.908,00 (serratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.473.835.660,00 (Dua puluh empat milyar

empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp808.822.644,00 (Delapan ratus delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.426.467.904,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.547.729.620,00 (Dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp185.645.178.444,00;
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp47.737.307.796,00;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp1.165.243.380,00;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.645.178.444,00; (Seratus delapan puluh lima milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.737.307.796,00 (Empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.165.243.380,00 (Satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp0,00; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp10.000.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp0,00;
 - b. Pencairan dana cadangan Rp0,00;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD Rp0,00;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

Pasal 16

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 19

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 20

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp Rp0,00 (Nol rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp10.000.000.000,00) (Minus Sepuluh milyar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 46



KOTA PEKANBARU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	991.723.521.011,00
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	46.455.415.967,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	45.805.334.468,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	45.805.334.468,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	650.081.499,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	650.081.499,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	142.469.256.583,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	106.089.293.850,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	106.089.293.850,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.085.427.946,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.085.427.946,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	29.923.905.091,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	29.923.905.091,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	510.928,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	510.928,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	188.991.964,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	188.991.964,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	181.126.804,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	181.126.804,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	18.110.666.817,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	8.401.410.505,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	8.401.410.505,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	62.065.029,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	62.065.029,00
4.1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.322.304.079,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.322.304.079,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	141.720.593,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	141.720.593,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.364.291.609,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.364.291.609,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.481.717.497,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.481.717.497,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	327.157.505,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	327.157.505,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	32.815.918.102,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	31.025.462.716,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	31.025.462.716,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.787.807.805,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.787.807.805,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.647.581,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.647.581,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	159.381.744.973,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	348.376.024,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	348.376.024,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	159.033.368.949,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	159.033.368.949,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	18.852.037.685,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	18.852.037.685,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	18.852.037.685,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	13.933.548.773,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	13.933.548.773,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	13.933.548.773,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	80.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	80.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	80.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.478.171,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.478.171,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.478.171,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	206.233.790.355,00
4.1.01.15.01	PBBP2	206.233.790.355,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	206.233.790.355,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	206.913.244.199,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	184.021.919.779,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	184.021.919.779,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	22.891.324.420,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	22.891.324.420,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.564.561.600,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	30.475.643.800,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	394.017.800,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	394.017.800,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.950.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.950.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.240.746.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	323.280.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	368.640.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	548.826.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	390.880.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	390.880.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.286.917.800,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	806.417.800,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	342.400.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	394.017.800,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	20.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	26.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	26.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	650.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	650.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	804.500.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	804.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	16.802.000.000,00
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	50.000.000,00
4.1.02.03.05.0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	50.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.590.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.590.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	162.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	162.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.220.098.957,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.337.938.223,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.337.938.223,00
4.1.03.02.04	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	2.882.160.734,00
4.1.03.02.04.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	2.882.160.734,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.682.758.829,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.277.675.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.277.675.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.277.675.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.067.491.305,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	5.000.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	5.000.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.200.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.100.000.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.800.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	700.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450.000.000,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	540.000.000,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.100.000.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	300.000.000,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	275.000.000,00
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	10.000.000,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	50.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	155.000.000,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000.000,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	80.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.854.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.544.000.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000.000,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	10.000.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	30.000.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.000.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	600.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	600.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.125.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	7.125.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	529.327.980,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	529.327.980,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	529.327.980,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	64.158.264.544,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	64.008.264.544,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	64.008.264.544,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	100.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	100.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.001.927.231.061,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.619.494.010.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	234.947.234.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	44.096.717.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	103.228.181.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	67.533.452.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.701.397.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.290.332.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	972.739.810.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	877.551.186.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	16.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	22.976.793.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	32.070.317.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.366.675.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	5.174.839.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.999.381.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	233.289.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	19.203.700.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.406.533.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.707.860.000,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	4.406.426.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	466.649.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.640.000.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	48.934.924.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	329.807.585.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	150.382.100.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.625.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	122.176.709.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.864.701.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.616.800.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.812.900.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.509.515.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.426.183.000,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	343.484.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.644.193.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.138.188.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.138.188.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.138.188.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	375.295.033.061,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	364.915.033.061,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	364.915.033.061,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	129.963.393.255,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	79.419.152.997,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	103.605.975.571,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.263.761.499,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.662.749.739,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.380.000.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	10.380.000.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.380.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.993.650.752.072,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.493.712.509.089,00
5.1.01	Belanja Pegawai	915.096.344.635,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	454.296.515.756,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	329.474.920.732,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	291.174.143.728,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.300.777.004,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.355.805.454,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.320.424.762,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.035.380.692,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.771.294.442,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.771.294.442,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.237.883.264,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.268.879.632,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.969.003.632,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.452.257.742,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.325.163.178,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.127.094.564,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.976.990.194,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.338.582.324,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.638.407.870,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.118.675.812,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.231.621.588,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	887.054.224,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	199.561.908,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.382.364,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	195.179.544,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.473.835.660,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.854.425.986,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.619.409.674,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	808.822.644,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	690.128.418,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	118.694.226,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.426.467.904,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.075.722.012,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	350.745.892,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	234.547.729.620,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	185.645.178.444,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	180.863.537.064,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.781.641.380,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	47.737.307.796,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	47.731.598.028,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.709.768,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.165.243.380,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.165.243.380,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	190.695.134.130,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	33.813.047.744,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.038.231.375,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	5.380.786.077,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	794.605.505,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.439.798.406,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7.387.749.060,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	827.133.153,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	611.334.452,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.240.428,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	459.729,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	6.575.746.529,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.751.963.030,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.011.148.394,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	65.795.700,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	225.000.000,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.544.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	125.000.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	750.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	47.500.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	176.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	479.382.694,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	133.308.859.276,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	133.308.859.276,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	14.360.922.840,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	14.360.922.840,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.770.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.416.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	52.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	302.400.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.340.850.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	1.340.850.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.089.905.876,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	2.089.905.876,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.448.089.668,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	860.580.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	860.580.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.823.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.823.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	71.715.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	71.715.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.247.841.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.247.841.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.775.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.775.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.396.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.396.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	866.216.196,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	866.216.196,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.627.980.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	383.400.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.480.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.100.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.230.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.503.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.503.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	461.456.622,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	461.456.622,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.121.452.161,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.850.450,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.850.450,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.817.392,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.817.392,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	224.640,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	224.640,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	926.894.358,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	52.262.342,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	158.027.913,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.374.500,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	36.917.907,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	189.429.463,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	21.208.542,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	15.675.242,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	134.369,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.787,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	192.199.894,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	240.652.399,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.326.960.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	327.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	327.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	999.360.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	999.360.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.660.463.300,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.660.463.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.660.463.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.205.918.613,00
5.1.02.01	Belanja Barang	458.324.512.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	458.266.662.550,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.454.346.019,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	930.045.750,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.428.625.970,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	149.632.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.819.083.316,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	52.920.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.720.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.303.073.040,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.726.497.162,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.389.741.700,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	68.627.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	26.692.200,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	225.908.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.495.408.410,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.644.152.891,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.053.035.225,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.046.870.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.945.258.670,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.434.695.816,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.107.166.850,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.650.440.671,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	425.774.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.676.841.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.656.363.563,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.414.126.801,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.003.051.725,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	104.586.660.176,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	27.868.560.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	113.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.080.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.005.683.400,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.260.186.900,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	66.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.014.553.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	535.675.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	459.619.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.023.483.200,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	265.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.158.686.495,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.447.464.400,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	183.060.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	32.850.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	74.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	627.145.300,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.221.159.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	458.452.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	525.255.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	105.750.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	51.000.000,00
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	51.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.850.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	250.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.200.000,00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	753.237.658.406,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	620.015.468.074,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	50.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.860.389.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.509.280.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	366.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.411.352.600,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.301.854.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	728.800.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	122.750.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	77.506.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.646.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	30.994.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.333.030.999,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.113.730.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.883.144.980,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.870.594.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	3.829.050.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.602.005.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	975.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	18.090.354.920,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	396.119.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.130.891.160,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	796.277.970,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.830.261.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.153.161.240,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	49.284.729.760,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.397.574.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.561.056.320,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.995.341.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.997.129.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.748.570.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.701.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	729.205.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	31.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.758.250.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	186.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	342.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	29.152.628.273,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.300.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	158.690.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	442.903.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	55.485.824.742,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.159.130.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	528.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	69.458.375.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	709.788.174,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	45.266.209,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	97.223.263.946,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	958.714.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.075.466.081,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	604.076.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.547.394.900,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	60.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	394.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.545.350.740,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	38.696.768.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	862.789.752,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.402.581.388,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.583.211.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	124.855.800,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	108.159.000,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	8.424.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	8.272.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.393.560.701,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	142.500.000,00
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	11.400.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.216.420.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	118.025.900,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.093.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	924.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	811.200.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.724.337.138,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.783.852.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	25.750.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.533.500,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	104.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	74.001.000,00
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	120.000.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	204.600.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	96.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	110.711.500,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	70.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	56.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	585.679.663,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.141.304.200,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.338.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.239.650.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	88.565.200,00
5.1.02.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	180.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	750.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	594.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.507.489.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	185.400.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	43.200.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	208.177.600,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	161.377.600,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	46.800.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.396.646.293,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	730.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	163.500.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	165.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	658.500.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	900.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	410.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.900.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.285.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	850.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	115.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	827.187.293,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	650.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	1.070.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	341.959.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.457.790.800,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.190.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	260.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	45.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	10.200.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	5.195.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	826.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.895.151.200,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.856.439.600,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	80.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00
5.1.02.02.10.0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	50.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.062.905.500,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.604.837.500,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.492.895.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	964.173.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.841.598.698,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	405.338.030,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.215.466.958,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	175.769.066,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	266.607.315,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.368.746.121,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	200.919.545,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	116.942.021,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.299.539.522,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.772.270.120,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	86.412.942.088,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	400.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.898.346.630,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.920.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	32.640.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	37.500.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	14.400.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.616.889.090,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.376.956.580,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.350.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.683.009.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	890.794.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	156.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	21.019.900,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.250.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	124.300.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.936.861.560,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	630.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.372.715.600,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.220.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	167.250.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.624.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	164.816.400,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	998.973.600,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	487.099.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.277.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.965.400.900,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.820.899.458,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.472.635.352,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.799.966.392,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	18.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.016.429.714,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	410.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	455.868.000,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.325.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.400.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	593.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	330.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.948.696.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	17.948.696.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.05.0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	315.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	315.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.229.598.950,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.631.958.664,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.557.287.864,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	306.748.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.369.986.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.397.936.800,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	597.640.286,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	597.640.286,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.664.108.650,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.455.511.050,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.271.550.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.810.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.917.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.456.961.050,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	208.597.600,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	97.500.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	111.097.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.268.074.309,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.268.074.309,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.268.074.309,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.069.023.660,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.069.023.660,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.069.023.660,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.199.925.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.199.925.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.199.925.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.199.925.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	103.131.920.841,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.152.500.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.152.500.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.152.500.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	79.604.366.450,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.929.700.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.929.700.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	55.348.566.450,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	55.348.566.450,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.326.100.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.326.100.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.074.120.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.074.120.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.074.120.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	16.300.934.391,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	16.300.934.391,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	16.300.934.391,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.078.400.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	878.400.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	878.400.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	878.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	469.938.242.983,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	900.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	900.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.796.792.413,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.796.792.413,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.740.027.248,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.199.250.650,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.749.232.150,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	350.000.000,00
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	4.399.232.150,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	450.018.500,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	185.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	265.018.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	29.121.032.546,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	29.121.032.546,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.932.224.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	6.600.186.700,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.228.250.352,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.997.443.994,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	160.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.202.927.500,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.513.797.700,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.752.700,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	500.000,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	13.387.500,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	7.865.200,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	36.395.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	31.945.000,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	3.600.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	850.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.455.650.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.200.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	7.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.447.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.817.894.221,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.726.611.700,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	234.847.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.106.920.600,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.384.843.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.041.420.391,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12.839.473.790,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.259.164.600,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.804.617.001,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	113.665.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.049.862.130,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	410.162.230,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	918.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	430.344.300,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	105.000.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	68.274.800,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	118.080.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.833.788.900,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.791.888.900,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	523.587.900,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	898.846.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	170.000.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.000.000.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	59.455.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	140.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	24.000.000,00
5.2.02.06.03.0022	Belanja Modal Humidity Control	24.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	5.900.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	5.900.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.772.639.728,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	49.772.639.728,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	730.909.674,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.130.400.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	27.107.063.220,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.077.535.780,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.606.200.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.754.700.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.463.560.156,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	890.290.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.526.779.692,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	5.485.201.206,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.368.451.960,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	950.918.560,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	935.868.505,00
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	550.000,00
5.2.02.08.01.0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	14.500.055,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	370.775.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	370.775.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.050.000,00
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	550.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.500.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	44.708.400,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	44.708.400,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.857.613.349,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.882.210.052,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.438.609.252,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.443.600.800,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.975.403.297,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	579.421.002,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.007.985.700,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.348.568.300,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.039.428.295,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.500.000,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	6.500.000,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faselistrik	6.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.938.136.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.938.136.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.938.136.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.500.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.500.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	22.500.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.330.775.453,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.330.775.453,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.330.775.453,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.957.646.741,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.957.646.741,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.957.646.741,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.137.817.198,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	76.982.306.938,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.982.306.938,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.914.163.651,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.342.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.729.028.605,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.000.114.682,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	326.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.671.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	455.395.500,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	455.395.500,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	455.395.500,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.114.760,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.114.760,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.114.760,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.349.285.177,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.868.123.552,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.874.373.552,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	6.072.336.320,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	64.802.037.232,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	993.750.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	993.750.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	62.991.984.048,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	51.487.984.048,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	51.487.984.048,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.379.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	8.379.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.900.000.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	300.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.600.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	225.000.000,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	225.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.200.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.200.000.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	3.200.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	13.289.177.577,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	13.289.177.577,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.289.177.577,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.544.403.447,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	37.150.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	37.150.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	7.150.000,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	30.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.299.937.600,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.239.937.600,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.239.937.600,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	60.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	60.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.107.315.847,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.107.315.847,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.107.315.847,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.469.917.500,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.469.917.500,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.469.917.500,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.419.917.500,00
5.2.06.01.01.0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	2.000.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.983.650.752.072,00
	Total Surplus/(Defisit)	10.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-10.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru



Muflihun, S.STP., M.AP